



Slow Trade – Sound Farming

Sebuah kerangka multilateral untuk pasar pertanian yang berkelanjutan



HEINRICH
BÖLL
STIFTUNG

MISEREOR
IHR HILFSWERK

Wuppertal Institute
for Climate, Environment
and Energy



Dokumen ini dihasilkan dengan dukungan dari Uni Eropa. Isi yang terkandung didalamnya merupakan tanggungjawab Misereor dan Heinrich-Böll-Stiftung, serta tidak mencerminkan pandangan Uni Eropa.

Slow Trade – Sound Farming

Sebuah kerangka multilateral untuk pasar pertanian yang berkelanjutan

- Penulis naskah asli Wolfgang Sachs dan Tilman Santarius
- Bekerja sama dengan Souleymane Bassoum, Daniel De La Torre Ugarte, Gonzalo Fanjul Suárez, Anna Luiza Ferreira Pijnappel, Arze Glipo, Aileen Kwa, Hannes Lorenzen, Sophia Murphy, Oduor Ong'wen, Rita Schwentesius Rindermann
- Diterbitkan oleh Heinrich Böll Foundation dan MISEREOR
- Edisi pertama September 2008
- © Heinrich Böll Foundation
Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.
- Tata letak Michael Pickardt
- Manajemen proyek oleh Christine Chemnitz (Heinrich Böll Foundation)
Mute Schimpf (MISEREOR)
- Penerjemah Wahyuni R. Kamah
- Penyunting Tina E.T.V. Napitupulu
- Dapat diunduh dari www.ecofair-trade.org
- Foto-foto Misereor

MISEREOR
Mozartstr. 9
D-52064 Aachen
Phone +49 241442-168
Fax +49 241442-505

www.misereor.org

Heinrich Böll Foundation
Schumannstraße 8
D-10117 Berlin
Phone +49 30 28534-0
Fax +49 30 28534-109
info@boell.de
www.boell.de

Slow Trade – Sound Farming

Sebuah kerangka multilateral untuk pasar pertanian yang berkelanjutan

Versi ringkasan laporan Dialog Ecofair Trade

Penulis

Wolfgang Sachs dan Tilman Santarius

Bekerja sama dengan

Souleymane Bassoum

Daniel De La Torre Ugarte

Gonzalo Fanjul Suárez

Anna Luiza Ferreira Pijnappel

Arze Glipo

Aileen Kwa

Hannes Lorenzen

Sophia Murphy

Oduor Ong'wen

Rita Schwentesius Rindermann

Diterbitkan oleh

The Heinrich Böll Foundation dan Misereor

Bekerja sama dengan

Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy

Konsultasi Regional
Amerika Utara

Washington D.C, Amerika Serikat
September 2006



Konsultasi Regional
Eropa

Brusel, Belgia
November 2006



Konsultasi Regional
Amerika Tengah dan
Meksiko

Teotihuacan, Meksiko
Oktober 2006



Konsultasi Regional
Afrika Barat

Mbour, Senegal
Februari 2006

Konsultasi
Regional
Amerika Selatan
Curitiba, Brazil
Agustus 2006





Konsultasi
Regional
Jerman
Berlin, Jerman
Oktober 2006



Diskusi Panel
Dialog Ecofair Trade
Hong Kong
Desember 2005



Konsultasi Regional
Asia
Chiang Mai, Thailand
Mei 2006

DIALOG ECOFAIR TRADE

Arahan Baru untuk Peraturan Perdagangan Produk Pertanian

Kata Pengantar

Pada April 2007, laporan *Slow Trade – Sound Farming* yang didalamnya berisi berbagai usulan dari proyek Dialog EcoFair Trade untuk merombak sistem perdagangan pertanian dunia diterbitkan.

Ditengah berbagai perubahan cepat yang terjadi dalam pertanian, usulan-usulan ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan, lebih daripada waktu-waktu sebelumnya.

Hingga saat ini, pertanian tetaplah merupakan satu isu yang paling diperdebatkan di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization – WTO*) dan menjadi alasan utama berhentinya proses di dalam organisasi tersebut. Berbagai pengalaman yang muncul dari liberalisasi pasar dalam kerangka kerja WTO dan perjanjian-perjanjian perdagangan regional serta program struktural telah memperlihatkan, bahwa petani kecil di Utara maupun di Selatan sangat rentan terhadap dampak buruk perdagangan global.

Dampak-dampak yang muncul antara lain semakin tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang dan hilangnya akses pasar serta sumber daya seperti tanah, air dan benih. Menurunnya kualitas ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati dan budaya juga merupakan keprihatinan tersendiri. Tantangan yang dihadapi pertanian pada abad 21, seperti perubahan iklim dan berakhirnya masa minyak bumi murah, juga

belum dipertimbangkan dalam peraturan perdagangan pertanian yang berlaku saat ini.

Belum lagi, kondisi pertanian yang telah banyak berubah semenjak April 2007. Harga-harga produk pertanian naik hingga hampir 40 persen, investor swasta dan para spekulasi telah memanfaatkan pertanian untuk kepentingan mereka sendiri, persaingan produksi biofuel dan produksi pangan semakin menajam dan dampak dari perubahan iklim yang semakin terasa oleh para petani.

Tetapi bagaimana caranya agar tatanan perdagangan dunia dapat didorong sehingga bersumbangsiah terhadap keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia? Bagaimana perdagangan harus dibangun sehingga sanggup menghadapi tantangan-tantangan di depan? Heinrich Böll Foundation dan MISEREOR bekerjasama dengan Wuppertal Institute dan kelompok-kelompok ahli dari berbagai belahan dunia membedah pertanyaan-pertanyaan itu dalam dialog EcoFair Trade.

Konsultasi-konsultasi regional yang melibatkan perwakilan dari organisasi tani, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintahan, parlemen, dan masyarakat ilmiah dan organisasi internasional, diadakan di Afrika, Asia, Amerika Latin, Amerika Utara dan Eropa. Ringkasan laporan ini dirancang sehingga memudahkan pembaca memahami hasil-hasil dari dialog tersebut.

Pendahuluan

Kata agri dan kultur yang menjadi akar kata agrikultur (*agriculture*), merupakan bukti nyata bahwa, pertanian atau agrikultur bukanlah sekedar sebuah sektor dalam ekonomi. Berbagai praktek pertanian yang ada di banyak belahan dunia menunjukkan bahwa selain untuk menyediakan pangan dan menghasilkan bahan mentah lain, pertanian memiliki banyak peran.

Pertanian memanfaatkan, membudidayakan, dan memelihara ekosistem. Dia juga menopang perekonomian dan kebudayaan di wilayah pedesaan, serta menyimpan pengetahuan tentang berbagai praktek pertanian yang sangat beragam. Namun sayangnya, ketika kebijakan-kebijakan perdagangan dirumuskan, tidak ada satupun pemikiran yang mempertimbangkan peran pertanian yang sangat multifungsional ini. Sebaliknya, pertanian hanya dipandang dari perspektif ekonomi saja. Demi memaksimalkan nilai produksi, kebijakan perdagangan internasional mendorong produksi pertanian masuk ke dalam persaingan internasional yang sangat ketat dan mengakibatkan terancamnya peran pertanian yang sangat multifungsi ini.

Heinrich Böll Foundation dan Misereor memberikan reaksi atas keadaan ini dengan meluncurkan proyek *EcoFair Trade Dialogue: New Directions for Agricultural Trade Rules* yang juga merupakan kerja sama dengan Wuppertal Institute for Climate, Environment, and Energy. Tujuan yang ingin diraih dari proyek ini adalah untuk memprakarsai sebuah proses dialog internasional yang melibatkan wakil-wakil masyarakat sipil, ilmu pengetahuan dan politik, untuk menyusun konsep tentang rezim perdagangan yang berkelanjutan yang memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan.

Munculnya dialog ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertanian kecil haruslah mendapatkan perhatian khusus, karena peran mereka yang sangat penting dalam sistem lingkungan dan sosial pedesaan dan karena tujuan dari rezim perdagangan masa depan haruslah untuk mengubah kondisi sosial dan lingkungan di sektor pertanian secara signifikan. Laporan *Slow Trade – Sound Farming* ini, memberikan gambaran besar tentang apa yang dicapai oleh proyek Dialog *EcoFair Trade* sejauh ini.

Dialog ini menganalisa masalah-masalah terpenting yang mengancam peran pertanian yang multifungsi, hak asasi manusia, dan lingkungan alam sekitar, yang muncul sebagai akibat dari meningkatnya liberalisasi perdagangan pertanian.

Dialog ini juga menyepakati prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan untuk sebuah rezim perdagangan yang berkelanjutan dan melihat peluang-peluang yang ada. Pemaparkan tentang berbagai perangkat politik serta lembaga yang diperlukan guna menjamin sebuah rezim perdagangan pertanian yang adil dan ramah lingkungan juga dilakukan.

Sayang sekali, peraturan-peraturan perdagangan multilateral yang ada saat ini tidaklah cukup untuk menjamin keadilan dan keberlanjutan dalam perdagangan pertanian. Pemerintah setiap negara seharusnya meninjau kembali strategi ekspor pertanian mereka dan memberikan prioritas lebih tinggi bagi strategi pembangunan nasional yang terpadu. Akan tetapi—mengingat peran penting yang dimiliki oleh rezim perdagangan internasional maka Dialog *EcoFair Trade* memilih untuk memusatkan usahanya untuk membangun perdebatan mengenai peraturan-peraturan perdagangan alternatif.

Dialog Ecofair Trade

Munculnya Dialog Ecofair Trade pada awalnya merupakan reaksi atas kegagalan Pertemuan Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Cancun, Meksiko pada bulan September 2003.

Fase pertama dari kegiatan ini berjalan pada tahun 2005 dengan dilakukannya dialog kelompok pakar. Dua belas orang ahli dalam kelompok tersebut —yang mencakup pakar perdagangan, para pendorong pertanian berkelanjutan, ilmuwan, dan penasihat politik bagi parlemen dan pemerintah—didatangkan dari berbagai belahan dunia. Mereka melakukan pertemuan sebanyak lima kali

di Meksiko, Jerman, dan Senegal guna membahas perkembangan perundingan perdagangan yang sedang terjadi dan untuk mengetahui keadaan dan pembangunan pertanian terkini di seluruh dunia. Hasil dari putaran diskusi ini adalah tersusunnya konsep usulan awal peraturan perdagangan alternatif yang kemudian diterbitkan dalam bentuk sembilan naskah diskusi (untuk selanjutnya, lihat daftar bacaan yang direkomendasikan atau unduh naskah di www.ecofair-trade.de).

Maka pada tahun 2006, untuk menguji konsep-konsep usulan awal ini dengan berbagai kondisi

pertanian yang berbeda di setiap wilayah, konsep-konsep tersebut dibahas dalam berbagai konsultasi regional. Tujuh konsultasi regional yang serupa berlangsung antara bulan Pebruari dan November 2006. Secara keseluruhan, sekitar 200 orang dipilih dan terlibat dalam proses dialog tersebut. Mereka terdiri dari anggota organisasi petani dan organisasi akar rumput, pengambil keputusan di pemerintahan, serta perwakilan-perwakilan organisasi internasional.

Konsultasi regional untuk Afrika Barat berlangsung di Senegal; untuk Asia Tenggara diadakan di Thailand; untuk Amerika Utara, Tengah dan Selatan masing-masing diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Brasil; dan untuk Eropa konsultasi dilaksanakan di Belgia dan Jerman. Para utusan ini secara kritis membahas konsep usulan awal yang disusun oleh kelompok pakar dan mengembangkannya dengan semangat keberagaman politik, budaya serta pengalaman dan kondisi pertanian yang mereka alami.

Sebagai moderator dari Dialog *EcoFair Trade*, Wolfgang Sachs dan Tilman Santarius dari Wuppertal

Institute for Climate, Environment, and Energy kemudian membandingkan dengan seksama hasil dari seluruh naskah dan kesimpulan yang diperoleh dari semua putaran diskusi yang telah berlangsung. Mereka juga melihat rekomendasi yang dibuat oleh badan konsultasi internasional yang terdiri dari para pakar dan pembuat keputusan politik. Sachs dan Santarius lalu merangkum semuanya kedalam sebuah konsep usulan yang lebih sempurna dan diterbitkan pada April 2007 dengan judul *Slow Trade – Sound Farming. A Multilateral Framework for Sustainable Markets in Agriculture* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, Jerman, Italia dan Spanyol.

Laporan ini menandai titik awal dan menjadi landasan bagi fase kedua Dialog EcoFair Trade, yang akan berlangsung hingga 2010. Pada fase ini, laporan tersebut akan digunakan untuk memprakarsai berbagai perdebatan mengenai struktur dari sebuah rezim perdagangan pertanian yang berkelanjutan dan adil, dan juga untuk memberikan daya dorong baru bagi terwujudnya sebuah perdagangan pertanian yang berkelanjutan.

Kelemahan rezim perdagangan saat ini

Perundingan-perundingan di dalam WTO yang terkait dengan pembentukan sebuah kerangka multilateral untuk membangun sistem ekonomi yang global, berpusat pada perombakan berbagai peraturan perdagangan pertanian. Namun, berbagai perubahan yang dihasilkan hampir semuanya mengabaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani dan ekonomi pedesaan, yang muncul akibat dari kemiskinan, kerusakan lingkungan dan kenaikan harga minyak. Beragam peraturan yang dikembangkan oleh organisasi ini diutamakan untuk mengembangkan perdagangan barang-barang hasil pertanian dan tidak cukup mempertimbangkan aspek lingkungan serta sosial dari pertanian.

Kelemahan terbesar dari pendekatan semacam ini adalah karena pendekatan tersebut mendasarkan asumsinya semata-mata pada asumsi ekonomi yang menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan akan membawa kesejahteraan umum hingga tingkat yang terbesar, asalkan setiap individu diberi kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan (*benefit*) pribadi mereka (sebagai konsumen) atau laba (*profit*) pribadi mereka (sebagai produsen). Asumsi ini menghasilkan kesalahan berpikir yang mendasar, karena asumsi tersebut telah mengabaikan pening-

katan biaya sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh tekanan persaingan yang semakin besar terhadap pasar pertanian.

Barang-barang umum (*public good*) seperti perlindungan lingkungan hidup atau pelestarian lingkungan sosial kini tidak tersedia hingga tingkat yang memadai dan bahkan mendapatkan dampak yang buruk. Karena itulah tujuan utama dari berbagai regulasi harus ditetapkan agar dapat melindungi barang-barang umum dan menciptakan kerangka pasar pertanian global yang mendahulukan barang bersama (*common good*) diatas akumulasi modal pribadi. Baik pertanian kecil di negara berkembang maupun kegiatan pertanian di negara maju memiliki potensi untuk berkontribusi pada pembangunan yang memajukan barang bersama.

Metode-metode pertanian berkelanjutan telah menjadikan pertanian lebih produktif dan lebih efisien, juga telah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan per hektar tanah dibandingkan dengan pertanian industrial berskala besar. Ini dapat terjadi karena metode pertanian berkelanjutan mengeluarkan lebih sedikit modal dibandingkan dengan pertanian yang berskala besar. Pengeluaran yang lebih sedikit ini disebabkan karena metode

pertanian berkelanjutan merupakan bagian dari struktur ekonomi lokal dan regional.

Permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan oleh pertanian kecil juga menghasilkan pendapatan bagi usaha-usaha rumah tangga pedesaan lain, sehingga berkontribusi terhadap ekonomi pedesaan yang lebih kokoh. Di negara-negara berkembang khususnya, di mana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, pertanian kecil memberikan sumbangan yang sangat besar bagi pemenuhan pangan dan pemberantasan kemiskinan.

Terlebih lagi, struktur produksi skala kecil yang secara umum ditandai oleh keberagaman hayati yang lebih besar, juga mampu menyimpan pengetahuan lokal tradisional dengan lebih baik, dan jauh lebih mampu mengubah penggunaan bahan mentah yang bersumber dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang dapat diperbaharui.

Namun, di balik semua manfaat ini, berbagai peraturan WTO dan persetujuan perdagangan bebas lainnya malah menekan sistem pertanian kecil dan bukan melindungi atau memajukan sistem ini.

«Tentu saja, pertanian lebih dari sekedar sebuah bisnis. Namun, kita tetap harus memberi perhatian pada aspek tersebut, karena hari ini, petani-petani meninggalkan tanah mereka karena mereka tidak lagi dapat hidup dari pertanian. Jika orang-orang ini melantarkan kerja tani mereka, berarti mereka juga melantarkan peran-peran yang dilakukan pertanian dalam memenuhi kebutuhan manusia dan alam.»

Bruce Ross, Kantor Konsultan Ross Gordon, Belgia,
Dalam Konsultasi Regional Eropa, November 2006

Pengabaian kehidupan

Saat ini, hampir seluruh pertanian kecil di seluruh dunia berada pada garis kemiskinan. Semakin tingginya tingkat kemiskinan dan banyaknya kaum pedesaan yang hijrah – seperti yang terjadi di berbagai wilayah pedesaan di banyak negara berkembang – merupakan akibat dari strategi pembangunan yang kurang menghargai pertanian. Liberalisasi perdagangan telah semakin mengukuhkan keadaan tersebut.

Sejak tahun 1980-an, banyak negara di Selatan membuka pasar pertanian mereka dan mengakibatkan banjir barang-barang impor yang lebih murah. Banyak di antara barang-barang impor tersebut diproduksi dengan bantuan subsidi yang diberikan negara-negara maju kepada petani mereka. Gelombang impor murah ini mendesak harga-harga menjadi turun dan memaksa para petani kecil keluar dari pertanian. Kaum perempuan khususnya, meski menghasilkan setidaknya 65 persen dari semua pangan yang dikonsumsi dunia, acap kali tidak mampu bersaing. Inilah penyebab kenapa,

kemiskinan di wilayah pedesaan jauh lebih tinggi menimpa keluarga yang dikepalai oleh perempuan.

Liberalisasi perdagangan juga telah menciptakan daya dorong bagi meningkatnya orientasi ekspor pada sektor pertanian. Yang kemudian terjadi di dalam negeri adalah, persaingan memperebutkan faktor-faktor produksi yang sama diantara produksi komoditas ekspor dan produksi pangan. Akibat dari persaingan ini adalah semakin sulitnya petani kecil untuk mendapatkan akses ke faktor-faktor produksi yang mereka butuhkan.

Kombinasi antara kenaikan harga faktor produksi dan harga jual produk yang rendah telah memaksa pertanian kecil keluar dari usaha tani mereka. Karena pertanian skala besar tidak memiliki potensi penyediaan lapangan pekerjaan sebesar pertanian kecil, maka para petani yang telah terlempar keluar dari pertanian tidak memiliki pekerjaan. Mereka dibuat miskin, lalu terpaksa hijrah ke kota. Pemiskinan penduduk desa naik amat cepat ketika sektor ekonomi pedesaan tidak mampu lagi menyerap tenaga kerja yang berlebih ini.

Alam yang terlupakan

Pada awal tahun abad ke-21, beragam tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian telah terlihat dengan sangat jelas. Meskipun pada kenyataannya perubahan iklim, turunnya kualitas tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan semakin berkurangnya jumlah air akan memberikan dampak yang drastis pada hasil tanam, sektor pertanian tetap dituntut untuk mampu memenuhi permintaan tanaman pangan dan energi yang semakin meningkat.

Di wilayah tropis, industrialisasi pertanian sering kali sejalan dengan meningkatnya penggundulan hutan. Emisi dari peternakan intensif mempercepat perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati; konsumsi air yang berlebih dan pencemaran air yang disebabkan bahan kimia pertanian intensif juga mempercepat terjadinya krisis air; belum lagi budidaya tanam yang monokultur yang merusak kualitas tanah. Berbagai persoalan terkait pertanian ini kemudian semakin diperburuk dengan besarnya energi yang dibutuhkan industri pangan untuk memproses pangan dan untuk menjual produk-produk tersebut ke berbagai belahan dunia dengan transportasi beremisi tinggi.

Liberalisasi perdagangan pertanian tidak selaras dengan lingkungan. Pertama, karena aliran perdagangan internasional berarti semakin panjangnya jarak pangan (*food miles*) yang pada akhirnya meningkatkan emisi gas rumah kaca. Kedua, persaingan yang ketat mendorong semakin terindustrialisasinya pertanian dan semakin banyaknya penggunaan input-input pertanian kimia, metode

produksi yang membahayakan lingkungan. Ketiga, perpindahan produksi dari negara maju ke negara berkembang akan memberikan beban tambahan pada lahan pertanian dan selanjutnya mempercepat pengkhususan dan konsentrasi pertanian.

Ruang Lingkup Korporasi

Liberalisasi perdagangan didasarkan pada asumsi bahwa campur tangan pemerintah merupakan penghalang utama dari proses perdagangan bebas. Namun, berbagai pengalaman di pasar pertanian internasional telah menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan juga mengalami gangguan yang sama besarnya dari proses konsentrasi yang terjadi pada pasar, yang menyebabkan kekuatan pasar yang hanya berada di tangan sedikit pemain. Terjadinya konsentrasi dapat dilihat dengan banyaknya aktivitas mengolah dan memperdagangkan produk-produk pertanian – baik dalam sektor borongan atau supermarket – yang didominasi oleh segelintir perusahaan.

Konsentrasi pasar yang tinggi berarti perusahaan-perusahaan yang jumlahnya senantiasa berkurang, mempunyai kekuatan dalam menentukan harga bahan (input) dan produk pertanian. Melalui tindakan semacam ini, perusahaan telah menghalangi perdagangan bebas dan membatasi kesempatan petani kecil untuk memasuki pasar.

Terlebih lagi, pelaku pengolahan dan pengecer produk tani saat ini semakin gencar memberlakukan syarat-syarat pembelian produk pertanian dan mewajibkan standar produk serta proses tersebut untuk dipenuhi. Petani kecil sama sekali tidak terlibat dalam penetapan standar kualitas ini sehingga sangat sulit bagi mereka untuk memenuhi standar-standar tersebut apalagi untuk memanfaatkannya guna mendapatkan posisi pada pasar yang semakin terintegrasi.

Ketidakseimbangan kekuatan dalam rantai nilai (*value chain*) juga terjadi pada pertanian kontrak. Produsen kecil memiliki ruang yang amat sempit ketika melakukan tawar-menawar dengan para pembeli di pasar yang oligopolistik. Ini berarti, baik harga atau pun risiko produk tidak tersebar secara rata di antara mitra kontrak dan petani sedang dirampas kebebasannya untuk membuat keputusan terkait produksi.

Menanggung Ketidakseimbangan Beban

Selama kemampuan ekonomi yang berbeda dari tiap negara tidak diperhitungkan, maka penghapusan hambatan perdagangan yang tidak menghiraukan kekuatan ekonomi masing-masing negara ini akan merugikan negara yang kurang kompetitif. Hal yang sama juga berlaku bagi para pelaku pasar pertanian, sektor dan perusahaan yang kuat dan kompetitif

mendapat keuntungan dari pasar bebas sementara petani kecil terpinggirkan oleh pasar tersebut.

«Di Indonesia kami telah mengalami permasalahan yang serius dengan perkebunan-perkebunan kelapa sawit. Ribuan hektar tanah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan luar negeri, hutan ditebangi dan penduduk sekitar hutan diusir dari tanah-tanah mereka. Sementara perkebunan diharapkan mampu menghasilkan sumber daya yang dapat ber-regenerasi, pada kenyataannya mereka mengeksploitasi sumber-sumber daya tersebut dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.»

Delima Hasri Azahari, Konsultan, Indonesia,
Dalam Konsultasi Regional Asia, Mei 2006

Seorang petani kecil di Indonesia sulit untuk dapat bersaing dengan petani besar dari Kanada atau pun perkebunan berteknologi tinggi di negaranya sendiri. Oleh karena itu, liberalisasi perdagangan pertanian yang pukul rata, tidak akan mengarah pada keadaan yang adil. Namun lepas dari itu, meski ada tuntutan untuk menghapus seluruh hambatan perdagangan di semua negara, hingga saat ini Persetujuan Pertanian (*Agreement on Agriculture – AoA*) WTO, misalnya, memperbolehkan negara-negara maju untuk menjaga tingkat perlindungan pertaniannya yang jauh lebih tinggi dari pada negara berkembang, baik dalam bentuk tarif dan skema-skema pendukung nasional lainnya. Mengingat ketidakadilan semacam inilah, maka maksud dari usaha untuk membentuk strategi pembangunan yang berjuang untuk meningkatkan ekspor pertanian patut dipertanyakan.

Berbagai pengalaman di negara-negara Selatan telah menunjukkan bahwa orientasi ekspor semata tidak mampu berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pengembangan manusia. Bahkan di negara-negara berkembang yang usaha ekspornya mengalami untung besar, sektor pertanian berorientasi ekspor tidak seiring sejalan dengan distribusi. Pendapatan terpusat pada ekonomi ekspor sementara sektor lain menjadi amat termiskinkan.

Meski harga pangan saat ini tinggi akibat kegagalan panen, permintaan pangan yang meningkat dan demam bio-fuel, pada kenyataannya harga-harga di pasar dunia untuk ekspor pertanian telah mengalami penurunan terus-menerus selama beberapa dasawarsa. Ini berarti bahwa negara-negara yang mengejar kebijakan orientasi ekspor dalam sektor pertanian dan secara bersamaan mengimpor barang-barang industri jadi, sedang mengalami proses ketimpangan yang terus-menerus pada *terms of trade* (perbandingan harga antara dua negara yang terlibat perdagangan internasional) mereka.

Secara umum, produsen-produsen kecil dan miskin-dan terutama perempuan-hanya mendapat sedikit manfaat dari perdagangan ekspor. Bahkan, akibat dari persaingan mengejar sumber daya

produktif ini, perluasan produksi ekspor akan semakin mempercepat konsentrasi dalam sektor pertanian dan akibatnya semakin memaksa perta-

nian kecil keluar dari usaha bertaninya. Maka yang terjadi sekarang adalah meningkatnya kemiskinan dan terancamnya pemenuhan pangan.

Prinsip-prinsip dasar dari rezim perdagangan pertanian yang berkelanjutan

WTO dengan perjanjian-perjanjian persetujuannya tak terhitung jumlahnya itu dilandasi pada dua prinsip utama: prinsip negara yang paling diistimewakan (*the most favoured nation*) dan prinsip non-diskriminasi (*non discrimination*). Meskipun keduanya penting, namun prinsip-prinsip itu tidaklah memadai untuk menjadi persyaratan bagi sebuah rejim perdagangan yang berkelanjutan. Bahkan, prinsip WTO tentang

melalui penggunaan sumber daya alami dan kemampuan pertanian untuk menyediakan barang bersama (*common goods*) yang bersumber dari alam.

Prinsip **hak asasi manusia** menjamin bahwa peraturan perdagangan tunduk terhadap Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan perdagangan internasional tidak boleh menyebabkan timbulnya ancaman terhadap kehidupan dan ketahanan pondasi ekonomi dari sebuah populasi. Secara khusus, hak atas pangan harus dilindungi.

Ekosistem dan sumber daya alam merupakan landasan kehidupan pertanian. Penggunaan sistem dan sumber daya yang tidak tepat, bagaimana pun juga, mengancam kehidupan pertanian dan memperparah masalah lingkungan global. **Prinsip keterpaduan lingkungan** berusaha untuk menjamin bahwa proses produksi pertanian tidak memberikan dampak negatif pada kemampuan kerja ekosistem atau pun melemahkan kemampuan regenerasi sumber daya alam.

Prinsip kedaulatan demokratis berusaha untuk menjamin bahwa kebijakan perdagangan suatu negara mencerminkan pilihan kolektif warganya. Berbagai perubahan dalam kebijakan perdagangan seringkali memiliki efek yang drastis pada pemenuhan pangan, kesejahteraan di wilayah pedesaan, kondisi lingkungan, dan potensi pengembangan masa depan ekonomi pedesaan. Karena itulah maka, penduduk suatu negara harus memiliki hak untuk membentuk pasar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam dunia yang sudah sangat terhubung, satu tindakan yang diambil oleh pemerintah dan produsen di suatu negara dapat memberikan dampak bagi negara-negara lain. **Prinsip tanggung jawab ekstrateritorial** berusaha untuk menghindari terjadinya pengambilan keuntungan oleh pihak tertentu dari pihak yang lain. Ketika suatu negara menerapkan strategi dan program politiknya, negara tersebut harus selalu berusaha menghindari akibat negatif yang mungkin akan ditimbulkan dari penerapan strategi tersebut terhadap negara-negara lain.

Prinsip dukungan ekonomi menyelesaikan konflik potensial antara prinsip kedaulatan demok-

«Apa yang terjadi pada rejim perdagangan bebas adalah, bukan hanya menduniakan pasar tetapi juga menduniakan kegagalan pasar. Pertanian industri yang padat input seringkali terkait dengan kegagalan pasar dan kerusakan lingkungan. Dunia sudah mencatat bahwa liberalisasi perdagangan telah mendorong tersebarnya bentuk-bentuk pertanian industri ke seluruh dunia. Ini telah menimbulkan masalah lingkungan yang teramat parah.»

Timothy Wise, Universitas Tufts, Amerika Serikat
Dalam konsultasi regional Amerika Utara, September 2006

perlakuan nasional (*national treatment*) harus diperbaiki karena merusak standar keberlanjutan dalam perdagangan dunia. Untuk itu laporan *Slow Trade – Sound Farming* menetapkan tujuh prinsip yang harus menjadi dasar untuk perdagangan produk-produk pertanian yang berkeadilan sosial dan menjamin keberlanjutan lingkungan.

Prinsip **multifungsionalitas** berusaha untuk memperhitungkan seluruh aspek yang ada dalam

«Ruang kebijakan bukanlah tentang bagaimana mengisolir diri kita dari dunia luar, tetapi lebih pada tentang bagaimana membentuk kebijakan kita sesuai dengan kondisi masing-masing negara dan wilayah dengan mempertimbangkan dan memprioritaskan hak rakyat untuk mengkonsumsi produk-produk yang sesuai dengan kebudayaan, kesehatan dan mampu diproduksi secara berkelanjutan»

Eva Carazo, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Kosta Rika,
Dalam Konsultasi Regional Amerika Tengah, Oktober 2006

pertanian. Dari sudut pandang budaya dan sosial, pertanian merupakan tonggak masyarakat di pedesaan dan landasan terbangunnya kebudayaan mereka. Pertanian juga terkait erat dengan ekosistem,

ratis dan prinsip tanggung jawab ekstra-teritorial. Kebijakan perdagangan harus disusun sedemikian rupa sehingga pertukaran ekonomi di tingkat lokal dan nasional, bila memungkinkan, lebih diutamakan ketimbang pertukaran yang terjadi di tingkat benua ataupun global. Kendali demokratis atas rantai pertukaran ini dapat dimaksimalkan dengan secara sistematis memberikan prioritas pertukaran pada rantai nilai yang pendek dibandingkan rantai nilai yang panjang. Kebijakan seperti ini juga memangkas

jarak pangan yang membahayakan lingkungan dan memperkuat jaringan produksi lokal.

Prinsip keadilan perdagangan berusaha untuk membentuk berbagai peraturan perdagangan internasional sedemikian rupa sehingga dapat mencapai keseimbangan ekonomi dunia. Hingga saat ini, penerapan peraturan-peraturan yang sama kepada semua negara lebih sering dimanfaatkan oleh pihak yang kuat padahal peraturan perdagangan seharusnya lebih berpihak kepada yang lemah.

Kebijakan dan tindakan yang perlu diambil untuk mewujudkan rezim perdagangan pertanian dunia yang berkelanjutan

Berdasarkan tujuh prinsip dasar ini, laporan *Slow Trade – Sound Farming* mengembangkan serangkaian alat kebijakan dan lembaga-lembaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah rezim perdagangan pertanian yang berkelanjutan. Sasaran dari berbagai tindakan ini adalah bukan untuk menghilangkan peraturan perdagangan, melainkan untuk mengatur perdagangan dan produksi pertanian secara umum, sesuai dengan prinsip-prinsip sosial dan lingkungan yang berkelanjutan

Memperluas ruang kebijakan nasional

Kebijakan perdagangan hanyalah satu dari banyak tonggak dalam kebijakan ekonomi sebuah negara, dan kebijakan ekonomi hanyalah satu dari banyak bidang kebijakan yang diatur oleh pemerintah nasional. Dengan demikian kebijakan perdagangan tidak dapat diutamakan di atas bidang kebijakan lain.

Selama bertahun-tahun, pemerintah nasional dibuat tidakberdaya karena mengikuti berbagai ketetapan dan persetujuan perdagangan internasional. Pemerintah nasional harus diberi hak untuk membentuk alur perdagangan sesuai dengan pilihan kolektif mereka. Artinya setiap negara harus diizinkan untuk memberlakukan harga minimum, peraturan investasi, serta standar lingkungan, sosial dan kesehatan dan yang terpenting, pemerintah juga harus memiliki kembali wewenang untuk menentukan impor barang, pelayanan, dan investasi.

Seperti yang kita tahu, pertanian merupakan sumber utama pendapatan bagi mayoritas penduduk di negara-negara Selatan. Untuk itulah, maka ketika mata pencarian domestik dan pemenuhan pangan

beresiko terancam akibat transaksi perdagangan internasional, liberalisasi impor harus menduduki posisi terakhir dalam kebijakan pemerintah. Peraturan perdagangan internasional harus memberikan lebih banyak kebebasan bagi pemerintah untuk melindungi pasar domestik mereka dari serbuan impor dengan membiarkan mereka untuk mengenakan tarif, kuota, dan berbagai tindakan perlindungan lainnya yang berbasis harga dan volume.

Negara-negara selatan juga memerlukan lebih banyak kebebasan politik untuk mempengaruhi gelombang investasi asing, mengendalikan kegiatan perusahaan transnasional, mengaitkan produksi

«Dukungan pemerintah untuk pertanian bukanlah suatu masalah, asalkan dukungan tersebut tidak untuk tujuan dumping. Beberapa bentuk dukungan dari pemerintah tidak menyebabkan dumping, seperti investasi pada penelitian, infrastuktur dan dukungan untuk program agro-ekologi dan penanaman hutan kembali.»

Tania Vanegas, Centro Humboldt, Nikaragua,
Dalam Konsultasi Regional Amerika Tengah, Oktober 2006

«Akses untuk pasar internasional bukanlah jawaban bagi permasalahan petani kecil, yang permasalahan utamanya adalah akses terhadap pasar lokal mereka yang dibanjiri dengan barang-barang impor berharga murah. Orientasi ekspor telah menyebabkan terbungkalai dan terpinggirkannya wilayah pedesaan.»

Ramiro Téllez, La Vía Campesina, Honduras,
Dalam Konsultasi Regional Amerika Tengah, Oktober 2006

domestik dengan standar-standar keamanan pangan atau lingkungan, ataupun untuk menyusun skema pendukung yang akan mampu mengembangkan ekonomi pedesaan yang sehat.

Berinvestasi dalam pertanian yang multifungsi

Agar pertanian terus dapat melakukan fungsinya, maka ia membutuhkan dukungan dari berbagai sisi. Sektor pertanian tidak hanya memproduksi barang yang semata-mata untuk diperjualbelikan – seperti pangan, makanan, dan cadangan pangan energi – tetapi ia juga bertanggung jawab atas barang-barang lingkungan dan sosial yang dimiliki bersama, seperti kualitas air, keindahan alam, budaya pedesaan, dan ikatan sosial. Hal-hal seperti itu tidak dapat dijamin hanya dengan sebuah mekanisme pasar. Kombinasi antara layanan umum, mekanisme pendukung dan kebijakan serta aturan pelaksanaan keuangan diperlukan untuk menjamin pemajuan peran pertanian yang multifungsi ini. Panduan internasional untuk memajukan pertanian domestik harus disusun sedemikian rupa agar memungkinkan pemajuan pertanian yang berkelanjutan di tingkat nasional.

Demi menjaga keberlangsungan kehidupan di pedesaan, petani kecil telah menyediakan berbagai layanan sosial dan lingkungan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, beban yang ditanggung petani ini kerap kali tidak mendapat dukungan – langsung maupun tidak – dari pemerintah. Mengingat peran penting petani dalam menyediakan layanan sosial dan lingkungan inilah, maka kebijakan pendukung harus dibenahi secara tuntas. Pembayaran langsung—yang jika masih dibutuhkan dalam kebijakan pertanian yang berkelanjutan—harus dikenai syarat-syarat yang ketat. Syarat-syarat tersebut tidaklah ditujukan sebagai insentif untuk meningkatkan produksi, dan harus dikaitkan erat dengan kriteria lingkungan dan sosial. Penerapan metode produksi yang berkelanjutan harus menjadi prasyarat bagi pembayaran langsung dan jumlah pembayaran harus dikaitkan

«Pengalaman dari wilayah kami menunjukkan bahwa hanya proses sertifikasi yang partisipatif-lah yang dapat bertahan. Sehingga, kita harus menguatkan petani dan organisasi produsen untuk mampu membuat sistem kendali kualitas mereka sendiri»

Fabiola Zerbin, FACES do Brasil, Brazil,
Dalam Konsultasi Regional Amerika Selatan, Agustus 2006

dengan jumlah orang yang dipekerjakan. Yang terutama dari penerapan metode ini adalah untuk menguatkan struktur tani.

Penelitian pertanian yang dibiayai publik juga harus berpusat pada kebutuhan di pedesaan, seperti pada perbaikan-perbaikan teknis yang tidak mahal yang telah diadaptasi untuk penggunaan

lokal yang mendorong kesesuaian antara produktivitas dan lingkungan hidup dalam sektor pertanian alami dan yang didasarkan pada pengetahuan tradisional. Beberapa tindakan yang dapat dipakai untuk mendorong produksi pertanian menjadi metode budidaya yang berkelanjutan, antara lain dengan pengenaan pajak, tarif dan pungutan pada cara dan metode produksi yang membahayakan lingkungan, memberikan pinjaman untuk investasi atas teknologi yang melindungi sumber daya ataupun memberikan dukungan bagi proses-proses lokal yang diinisiasi atau yang melibatkan masyarakat sipil untuk pengembangan proses dan standar-standar produk pertanian berkelanjutan.

Dalam tingkat apapun juga, prinsip tanggung jawab ekstra teritorial harus dijunjung dan berbagai bentuk dukungan dalam negeri tidak boleh memberikan dampak negatif terhadap produsen di negara lain. Agar prinsip semacam ini dapat berjalan maka mekanisme waspada dumping dapat dibentuk. Mekanisme ini akan memberitahu pemerintah bila harga impor turun di bawah biaya produksi yang berkelanjutan yang pada akhirnya mengancam sektor pertanian lokal.

Dalam penerapan mekanisme waspada dumping ini, negara pengekspor, terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada sebuah lembaga multilateral dan memberikan informasi tentang berbagai bentuk dukungan negara yang diberikan pada sektor pertanian beserta seluruh harga produk eksportnya.

Lembaga multilateral tersebut selanjutnya menghitung selisih antara harga ekspor dan biaya produksi. Berdasarkan hitungan tersebutlah maka lembaga ini lalu memberikan rekomendasi kepada negara-negara yang melakukan praktek dumping untuk menaikkan harga produk-produknya.

Menstabilkan harga

Salah satu yang menjadi permasalahan terbesar petani-petani di Utara maupun petani kecil di Selatan dalam beberapa dasawarsa belakangan adalah tidak stabilnya harga produk pertanian dan rendahnya harga di tingkat petani. Meskipun kelebihan pasokan selalu dijadikan alasan atas turunnya harga pasar dunia, sesungguhnya, meningkatnya kekuatan pasar agribisnis – yang selalu menjaga harga di tingkat petani tetap rendah bahkan ketika harga pasar dunia naik – telah menjadi permasalahan yang utama.

Ketidakstabilan dan penurunan harga sebenarnya dapat dikendalikan dengan adanya sebuah sistem manajemen persediaan nasional. Secara umum, sasaran dari manajemen persediaan adalah untuk menyeimbangkan produksi dengan tuntutan pasar. Unsur utama dari skema ini adalah sebuah sistem kuota produksi, dimana para petani mendapat

atkan perijinan yang memungkinkan mereka untuk memproduksi suatu komoditas dalam volume tertentu. Perijinan ini dapat dialihkan ke petani lain.

Pengurus sistem manajemen penyediaan bertugas untuk mengatur kepemilikan legal kuota dan berhak melakukan penyesuaian terhadap besaran hasil tanam yang diperbolehkan. Agar sistem ini dapat berfungsi dengan baik maka diperlukan mekanisme pengaturan yang fleksibel yang dapat dengan cepat dan efektif menyeimbangkan antara kebutuhan pasar dengan kapasitas produksi, misalnya, mekanisme yang dapat langsung menentukan besar kuota dan harga yang sesuai untuk setiap produk bagi pasar. Contoh berhasil adalah sistem kuota susu Kanada, yang diakui sebagai kesuksesan besar, bukan saja oleh pemerintah Kanada tetapi juga oleh para pengecer dan petani. Di masa lalu, memang sudah beberapa bentuk pengelolaan persediaan telah dijalankan oleh beberapa negara, dan sebagian masih menjalankannya hingga kini. Beberapa dari sistem ini tidak efisien dan dikelola dengan buruk, sebagai akibat dari tidak adanya mekanisme penyesuaian yang fleksibel.

Sayangnya, persetujuan perdagangan bebas yang saat ini berjalan juga telah memaksa pemerintah untuk melepaskan sistem manajemen persediaan nasional mereka. Padahal daripada melepaskan sistem seperti itu, lebih baik untuk mendukung dan mengkoordinasikan sistem manajemen persediaan nasional tersebut dalam sebuah 'kerangka kerjasama multilateral untuk menyeimbangkan persediaan pasar dunia'.

Kerangka kerjasama ini akan memungkinkan negara-negara untuk mencapai kesepakatan tentang batas minimum produksi atau ekspor, sehingga dapat meningkatkan harga pasar dunia di atas ambang minimum harga tertentu dan untuk menstabilkan harga produk pertanian. Pada kasus gandum atau jagung, misalnya, hanya ada enam produsen – Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Uni Eropa dan Amerika Serikat – yang berperan dalam 47 persen untuk produksi gandum dunia dan 58 persen untuk jagung produksi dunia. Enam negara ini juga mendominasi 52 persen untuk ekspor gandum global dan 64 persen ekspor jagung global.

Sebuah kerangka kerjasama multilateral untuk stabilisasi harga, yang melibatkan produsen-produsen tersebut sebagai pihak utama yang terlibat, akan memberikan sumbangan yang berarti bagi pengurangan kemiskinan dan pembaruan ekonomi atas ekonomi pedesaan di seluruh dunia. Untuk memastikan bahwa kerangka semacam itu dapat berjalan, maka mekanisme kendali dan pemantauan harus diterapkan. Mekanisme tersebut akan menjamin bahwa ketetapan-ketetapan diawasi dan akan membantu tiap negara melaksanakan sistem tersebut di tingkat nasional.

«Bagaimana bisa dan mengapa kita harus menghasilkan sesuatu bagi orang lain jika kita bahkan tidak bisa menyokong diri sendiri? Membangun pasar-pasar dalam negeri lebih penting daripada mendapatkan akses pasar luar negeri. Sehingga, penting bagi setiap negara untuk melindungi diri mereka dari impor produk pertanian.»

Eloi Nombéré, Confédération Paysanne du Burkina Faso,
Dalam Konsultasi Regional Afrika Barat, Pebruari 2006

Menetapkan standar untuk perdagangan yang berkualitas

Saat ini, biaya ekonomi dari produksi pertanian tidak mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan. Berkurangnya komunitas pertanian dan ekonomi pedesaan, rusaknya lingkungan dan kesehatan manusia yang disebabkan oleh produksi tidak pernah dimunculkan pada neraca saldo atau penghitungan ekonomi mana pun. Dalam rangka membalikkan kecenderungan ini, maka perlu ditetapkan standar keberlanjutan yang memasukkan biaya-biaya sosial dan lingkungan yang muncul dikemudian hari.

Pengembangan standar proses dan produk untuk praktik pertanian yang berkelanjutan, serta pengenalan program pengendalian dan pemantauan yang sesuai, haruslah didukung oleh pemerintah nasional. Sistem seperti ini, mula-mula dapat dijadikan contoh bagi pelaksanaan perdagangan yang adil dan standar-standar pertanian organik yang sukses sebelum pada akhirnya mengikat.

Guna menjamin bahwa petani yang melakukan produksi pertanian berkelanjutan tidak menjadi satu-satunya pihak yang terbebani dengan biaya produksi dan biaya pemantauan, maka pungutan terhadap komoditas-komoditas pertanian yang dihasilkan secara tidak berkelanjutan dapat diterapkan. Dana dari pungutan ini kemudian digunakan untuk mendanai produksi yang berkelanjutan. Penerapan semacam ini terjadi pada sektor energi di Jerman. Disana, produksi energi yang tidak berkelanjutan membiayai-silang pembangkit-pembangkit listrik yang ramah lingkungan.

Untuk memastikan bahwa rezim perdagangan internasional dibangun atas dasar keberlanjutan dan untuk menciptakan insentif global bagi penerapan metode produksi yang berkelanjutan, setiap negara harus diberi kesempatan untuk memastikan apakah akses terhadap pasar mereka telah memenuhi standar-standar keberlanjutan nasional.

Sebagai bagian dari sistem 'akses pasar yang sesuai', produk-produk yang dihasilkan secara berkelanjutan akan diberi prioritas akses pasar ketimbang produk yang dihasilkan secara tidak berkelanjutan. Pendapatan dari tarif produk-produk yang dihasilkan secara tidak berkelanjutan yang dikenakan tarif lebih mahal, kemudian disalurkan ke dalam dana internasional untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, yang akan mendorong perubahan praktik-

praktik pertanian menjadi berkelanjutan dan adil, serta pelaksanaan program-program 'akses pasar yang sesuai' di wilayah pedesaan di Selatan.

Dalam usaha menghentikan kemungkinan penyalahgunaan sistem 'akses pasar yang sesuai' oleh negara tertentu untuk tujuan diskriminasi perdagangan, satu *meta standar* yang berlaku global harus ditetapkan. Tujuan *meta-standar* ini bukanlah untuk melakukan harmonisasi standar-standar produksi, karena keadaan lingkungan, ekonomi, dan sosial sangatlah berbeda.

Sebaliknya, untuk penerapan standar-standar pertanian yang berkelanjutan, *meta-standar* akan menetapkan kriteria-kriteria proses yang bersifat terbuka, partisipatif dan yang melibatkan banyak pihak. Standar proses ini dapat mencontoh prakarsa yang diluncurkan oleh IFOAM atau ISO. Untuk menangani perselisihan antar negara yang menyangkut pengakuan standar bersama maka sebuah pusat mediasi perselisihan atas konflik dapat didirikan.

Mendemokrasiakan rantai makanan

Saat ini, kekuatan pasar yang sangat besar berada hanya di tangan segelintir perusahaan dan pasar pertanian dunia pun semakin terkonsentrasi. Dalam situasi yang seperti ini, maka untuk dapat meningkatkan kendali demokratis atas rantai komoditas transnasional dibutuhkan sebuah strategi yang komprehensif. Strategi yang menyeluruh ini mensyaratkan terbentuknya badan pengawas di tingkat multilateral serta reformasi kebijakan pertanian dan ekonomi di tingkat nasional.

Pertama-tama, sebuah kebijakan persaingan yang efektif terlebih dahulu harus diterapkan di tingkat multilateral. Prasyarat untuk kebijakan semacam itu adalah dibukanya informasi tentang ukuran dan lingkup agribisnis yang beroperasi lintas batas, juga informasi tentang penggabungan, pembelian dan kerjasama perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor pangan. Informasi ini kemudian disusun sebagai database yang dapat diakses oleh publik.

Berdasarkan ini maka badan persaingan dagang multilateral (*multilateral anti-trust body*) harus dibentuk. Badan ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggabungan dan pembelian perusahaan yang dilakukan perusahaan besar serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, kebijakan kompetisi yang efektif di tingkat multilateral tidak dapat berdiri sendiri, kebijakan ini memerlukan adanya peraturan persaingan yang efektif di tingkat nasional atau regional.

Kontrak perdagangan yang adil yang ditandatangani oleh berbagai negara, mampu menjamin bahwa perusahaan internasional memperlakukan pemasok

dan mitra kontrak yang terlibat dalam aktivitas usaha perusahaannya dengan adil dan berkelanjutan. Kontrak dagang yang adil, menjamin penyebaran laba yang merata sepanjang rantai komoditas lintas negara.

Perusahaan perdagangan, perusahaan pengolahan, ataupun pasar swalayan yang bergerak di tingkat transnasional diwajibkan untuk membayar harga yang adil kepada para produsen, yang mencakup biaya produksi yang berkelanjutan dan yang memungkinkan para petani kecil untuk menyokong diri mereka sendiri. Pengamatan syarat-syarat kontrak yang diputuskan dalam perundingan yang transparan dan partisipatif diantara mitra-mitra usaha, akan dipantau oleh semacam badan penyusun kontrak, yang dibentuk di tingkat internasional.

Sesuai dengan prinsip dukungan ekonomi, berbagai alat dan tindakan yang dipakai dan diambil di tingkat nasional akan menjamin bahwa jaringan produksi lokal dan regional akan mendapatkan prioritas diatas jaringan transnasional. Dalam rangka mencapai pembentukan kembali wilayah-wilayah perdagangan seperti ini maka pemerintah terlebih dahulu harus meninjau ulang dan memperbaiki peran perusahaan dagang negara, karena perusahaan milik negaralah yang dapat memainkan peran penting dalam menandingi kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan swasta besar.

Kedua, langkah-langkah politik harus diambil untuk meningkatkan terciptanya nilai di tempat produksi dan untuk meningkatkan keterkaitan berbagai sektor ekonomi lokal. Peraturan-peraturan seperti, yang mengharuskan perusahaan memakai bahan mentah yang dihasilkan secara lokal atau, yang mengharuskan perusahaan transnasional untuk melibatkan para pengolah lokal dalam kegiatan usaha mereka, harus mulai diperkenalkan. Selain itu, penerapan kebijakan "produksi-di sini-dijual-di sini" juga akan menguntungkan. Kebijakan semacam ini hanya akan membolehkan perusahaan-perusahaan asing untuk berjualan di pasar tertentu apabila mereka setuju untuk memproduksi di tempat yang sama.

Ketiga, prinsip mendasar lain dari membentuk kembali wilayah-wilayah (*re-regionalization*) adalah diperkenalkannya kebijakan yang dapat menjadikan biaya transportasi lebih mahal; bagaimana pun, ledakan yang terjadi dalam jaringan produksi lintas negara secara langsung terkait dengan biaya transportasi yang rendah. Target yang diharapkan adalah terjadinya internalisasi dampak-dampak eksternal yang dihasilkan oleh transportasi jarak jauh. Ini, misalnya, dilakukan dengan memungut biaya atas dampak yang disebabkan terhadap barang milik bersama, misalnya, biaya emisi pesawat atau biaya transportasi laut.

Memperbaiki ketidakseimbangan

Dalam sebuah rezim perdagangan yang adil yang berwawasan ramah lingkungan, memperbaiki keseimbangan ekonomi di antara negara-negara dan wilayah yang berbeda di dunia menjadi prioritas yang utama. Di tingkat multilateral, memperbaiki keseimbangan ekonomi berarti harus ada perlakuan khusus yang menyeluruh bagi negara-negara yang secara ekonomi lemah. Ini adalah satu langkah maju ketimbang aturan perlakuan yang khusus dan berbeda (*special and differential treatment*) yang saat ini berlaku dan yang isinya tidak lebih dari sekedar tindakan pelengkap untuk memperkecil dampak sosial perdagangan atau untuk memberikan waktu tambahan bagi masa peralihan sembari menunggu dilaksanakannya peraturan yang sama bagi semua negara.

Sebaliknya, laporan *Slow Trade – Sound Farming* mengusulkan aturan ‘perlakuan berbeda yang sistematis’, yang nantinya akan memberikan keuntungan pada seluruh transaksi perdagangan yang telah ditargetkan oleh negara-negara yang berekonomi lebih lemah. Untuk menentukan siapa yang akan memperoleh manfaat dari aturan ‘perlakuan berbeda yang sistematis’ maka kriteria yang obyektif, relevan, dan konsisten seperti pendapatan per kepala, tingkat kemiskinan, atau tingkat pemenuhan pangan, akan digunakan sebagai pembeda kondisi antar negara.

‘Akses pasar yang sesuai’ harus menjadi ciri utama dari sistem perlakuan berbeda ini, sehingga kesesuaian antara perdagangan dengan kualitas kehidupan dan perlindungan lingkungan dapat terjamin. Namun, dibalik sistem perlakuan berbeda seperti ini, yang paling penting adalah untuk melakukan berbagai usaha agar terjadi pergeseran paradigma dalam persetujuan perdagangan internasional.

Yang terpenting bagi jaringan pertukaran ekonomi internasional bukanlah untuk merangkul semua negara Utara dan Selatan. Sebaliknya, negara-negara berkembang dapat menggabungkan kekuatan, sehingga dengan efektif dapat merespon hal-hal yang menjadi kepedulian bersama demi terca-

painya kesejahteraan manusia dan pembangunan yang berkelanjutan. Perdagangan lintas batas tidak harus didorong oleh motivasi mengejar keuntungan ekonomi. Interaksi dapat juga terpusat pada pelaksanaan proyek-proyek sosial yang penting seperti kesehatan, infrastruktur, perumahan atau produksi yang berkelanjutan. Namun yang penting adalah bahwa persetujuan perdagangan untuk pelaksanaan proyek-proyek tersebut ditandatangani untuk tujuan kerja sama, dan bukan untuk tujuan persaingan.

Namun, peraturan perdagangan multilateral sendiri tidak cukup untuk menjamin keadilan dalam perdagangan pertanian. Pemerintah nasional harus melihat kembali strategi ekspor pertanian mereka dan mendahulukan strategi pembangunan nasional yang terpadu. Kebijakan ekspor yang berkelanjutan akan selalu menempatkan pemenuhan pangan nasional di atas kepentingan ekspor. Ini berarti bahwa, produksi pangan pertanian kecil yang ditujukan untuk mempertahankan hidup, dan produksi untuk pasar domestik harus ditempatkan lebih penting daripada produksi untuk pasar asing.

Usaha-usaha untuk menghentikan penguasaan lahan dan sumber-sumber daya alam oleh sektor ekspor – jika penguasaan itu berdampak negatif pada persediaan pangan dalam negeri – juga harus dilakukan. Begitu pula dengan usaha untuk menjamin penyebaran laba yang adil di sepanjang rantai nilai. Secara khusus, kebijakan ekspor yang berkelanjutan harus bekerja untuk mendorong keterlibatan produsen kecil, koperasi petani, dan tenaga kerja pedesaan, dan juga untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam usaha ekspor sehingga bisa menjamin kesetaraan gender dalam meraih keuntungan ekspor.

Kebijakan ekspor yang berkelanjutan ini harus mampu menandingi proses industrialisasi pertanian, dengan mendorong penyebaran pengetahuan yang berkelanjutan dan praktik produksi pertanian yang padat karya. Terakhir, kebijakan tersebut harus dapat menciptakan suatu kaitan yang efektif antara pertanian dan sektor-sektor ekonomi lokal yang lain sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang terpadu.

Kesimpulan: Menuju bangunan perdagangan pertanian pasca-WTO

Laporan *Slow Trade – Sound Farming* yakin bahwa kerangka multilateral perdagangan dunia untuk produk-produk pertanian tetap sangat diperlukan. Namun, WTO dalam bentuk-bentuk kelembagaannya saat ini telah gagal memenuhi persyaratan untuk menjadi kerangka multilateral yang dimaksudkan. Sehingga, WTO harus menggali kembali dirinya atau mengalihkan peran-peran pengaturan perdagangan pada lembaga lain yang berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.

WTO saat ini menjalankan tiga fungsi, yakni sebagai forum utama bagi perundingan antarperintah, menyebarluaskan peraturan-peraturan yang mengikat secara legal, dan menyelesaikan perselisihan perdagangan. Struktur institusional baru yang akan dibentuk pun harus melaksanakan fungsi-fungsi ini, selain melakukan fungsi yang baru. Sebelumnya, institusi yang baru ini harus menentukan terlebih dahulu tujuan keseluruhan yang benar-benar baru.

Menurut laporan *Slow Trade – Sound Farming*, setidaknya ada tiga fungsi tambahan yang harus dikembangkan. Ini mencakup pengendalian harga pasar internasional melalui mekanisme kerjasama yang dilandasi pada manajemen persediaan, pengendalian kualitas aliran perdagangan berdasarkan *meta-standar* multilateral, dan pengawasan persaingan melalui pengambilan tindakan yang mencegah terjadinya persaingan dagang yang tidak sehat.

«Tidak hanya ada satu jenis pasar dengan satu sistem perdagangan di dunia ini. Banyak jenis pasar dengan sistem produksi, perdagangan dan distribusi mereka masing-masing. Kita perlu untuk kembali me-regionalkan perdagangan. Pendekatan satu-ukuran-untuk-semua (one-size-fits-all) yang berfungsi untuk membentuk satu jenis pasar dunia tidaklah sesuai dengan kepentingan umum.»

Josefa Francisco, IGTN Asia, Filipin,
Dalam Konsultasi Regional Asia, Mei 2006

Jika sasaran WTO saat ini adalah untuk menghapus tarif dan hambatan non-tarif perdagangan demi terciptanya satu pasar global, maka lembaga baru yang berkesinambungan nantinya akan memberikan prioritas kepada pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tiap negara yang berbeda. Sasaran utamanya adalah mengelola dan bukan malah menghapus peran pemerintah dalam perdagangan internasional.

Untuk mampu menyelesaikan tugas-tugasnya secara efektif setidaknya lembaga yang baru tersebut membutuhkan lima bidang. Tugas utama dari **Bidang Koordinasi** adalah menyeimbangkan

prioritas-prioritas tiap negara dan kepentingan internasional. Yang terutama, bidang koordinasi berperan untuk menjamin bahwa lebih banyak ruang diberikan untuk kebijakan nasional dalam arena perdagangan. Bidang tersebut juga akan melakukan pemantauan dan, bila perlu, membatasi segala pengaruh yang membahayakan pasar internasional dan asing.

Sasaran dari **Bidang Kualitas** adalah untuk menjamin kualitas aliran perdagangan yang terjadi di pasar global. Yang penting dilakukan oleh bidang ini adalah untuk melakukan usaha yang mendukung diterapkannya standar keberlanjutan di tingkat nasional dan mendorong perundingan tentang meta-standar di tingkat multilateral.

Tugas dari **Bidang Pengelolaan Harga** adalah mengendalikan persediaan produk-produk pertanian guna mencegah fluktuasi harga yang ekstrem di pasar dunia. Lebih khusus, bidang ini akan mendukung perundingan tentang 'kerangka kerjasama multilateral untuk menyeimbangkan persediaan pasar dunia' yang didalamnya juga akan mengatur tentang pengendalian kapasitas produksi di negara-negara Utara dan Selatan yang mengekspor barang-barang pertanian sehingga dapat menghindari ketidakstabilan harga.

Bidang Persaingan Dagang bertanggung jawab untuk mendukung perundingan kebijakan-kebijakan persaingan di tingkat global. Secara khusus, bidang ini akan menerbitkan informasi-informasi terkait ukuran perusahaan internasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk penggabungan dan pembelian perusahaan, dan akan bertindak jika terjadi pengkonsentrasian pasar dalam input produksi, perdagangan, dan sektor grosir serta eceran.

Terakhir, **Bidang Penyelesaian Perselisihan** akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan di antara negara anggota, dan di antara negara anggota dan pihak ketiga, seperti perusahaan multinasional dan organisasi non pemerintah. Secara umum, bidang ini akan membentuk kelompok-kelompok kerja untuk penyelesaian perselisihan dagang, seperti yang saat ini telah ada di WTO.

Jika salah satu kelompok kerja tidak mampu mencapai kesepakatan yang dapat diterima seluruh pihak, maka perselisihan itu harus diserahkan kepada badan independen yang berada di luar lembaga. Karena mekanisme ini bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik di antara nilai-nilai sosial, lingkungan, dan komersial, maka sangat penting untuk menjamin tidakberpihakan mekanisme penyelesaian perselisihan ini.

Daftar Pustaka

Laporan:

- Sachs, Wolfgang / Santarius, Tilman (2007): Slow Trade – Sound Farming. A Multilateral Framework for Sustainable Markets in Agriculture. Heinrich Böll Stiftung / Misereor: Berlin / Aachen.

Naskah diskusi yang menjadi acuan laporan Dialog Perdagangan yang adil bagi Lingkungan:

- De La Torre Ugarte, Daniel (2006): The Contributions and Challenges of Supply Management in a New Institutional Agricultural Trade Framework. EcoFair Trade Dialogue Discussion Paper No. 6, www.ecofair-trade.org.
- Fanjul Suárez, Gonzalo (2006): Agriculture and Trade in an Asymmetric World. EcoFair Trade Dialogue Discussion Papers No. 3, www.ecofair-trade.org.
- Glipo, Arze (2006): Achieving Food and Livelihood Security in Developing Countries: The Need for a Stronger Governance of Imports. EcoFair Trade Dialogue Discussion Papers No. 2, www.ecofair-trade.org.
- Kwa, Aileen / Bassoum, Souleymane (2007): Exploring the Linkages Between Agricultural Exports and Sustainable Development. EcoFair Trade Discussion Papers No. 8, www.ecofair-trade.org.
- Lorenzen, Hannes (2007): Qualified Market Access. EcoFair Trade Dialogue Discussion Paper No. 5, www.ecofair-trade.org.
- Malhotra, Kamal (2006): A Sustainable Human Development Approach to the Role of Exports in a National Development Strategy. EcoFair Trade Dialogue Discussion Paper No. 4, www.ecofair-trade.org.
- Murphy, Sophia (2006): Concentrated Market Power and Agricultural Trade. EcoFair Trade Dialogue Discussion Paper No. 1, www.ecofair-trade.org.
- Ong'wen, Oduor / Wright, Sarah (2007): Small Farmers and the Future of Sustainable Agriculture. EcoFair Trade Dialogue Discussion Paper No. 7, www.ecofair-trade.org.
- Sachs, Wolfgang / Santarius, Tilman (2007): World Trade and the Regeneration of Agriculture. EcoFair Trade Dialogue Discussion Paper No. 9, www.ecofair-trade.org.

Pengunduhan dan informasi lanjut tersedia di: www.ecofair-trade.org.

Panel Ahli



Souleymane Bassoum

Senegal, Direktur AGRECOL-Afrique. Ia adalah seorang pakar kebijakan pertanian berkelanjutan di wilayah Afrika Barat. Wilayah kerja utamanya mencakup **pertanian ekologi** dan **perdagangan yang adil**. Ia juga merupakan seorang pelaku pertanian organik dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang pertanian.



Gonzalo Fanjul Suárez

Spanyol, Koordinator peneliti di Intermón Oxfam. Setelah beberapa tahun mengikuti dengan tekun negosiasi-negosiasi pertanian yang berlangsung di WTO serta dampak **kebijakan pertanian** Uni Eropa, ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang **perdagangan produk pertanian**. Latar belakang pendidikan yang ia miliki adalah ekonomi.



Arze Glipo

Filipin, Direktur Integrated Rural Development Foundation of the Philippines (IRDF) dan koordinator Asia Pacific Network on Food Sovereignty (APNFS). Ia memiliki pengetahuan yang mendalam untuk isu **perdagangan terkait jender** dan **kemiskinan**. Ia memegang gelar master untuk bidang **ekonomi pembangunan**.



Aileen Kwa

Singapura, saat ini menetap di Genewa dan merupakan konsultan kebijakan untuk isu perdagangan. Dia telah memonitor negosiasi perdagangan semenjak Pertemuan Tingkat Menteri di Singapura tahun 1996 dan telah bekerja dengan delegasi negara berkembang di Genewa terutama untuk **isu pertanian**. Kwa merupakan salah seorang penulis buku “Behind the Scenes at the WTO: The Real World of Trade Negotiations”.



Hannes Lorenzen

Jerman, adalah penasihat untuk Komite Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Parlemen Eropa untuk Kelompok Hijau/Kelompok EFA dan juga merupakan ahli untuk **kebijakan pertanian Eropa**. Ia memiliki master untuk sosiologi dan pertanian serta pascasarjana untuk bidang **pengembangan pedesaan internasional**.



Sophia Murphy

Adalah orang Inggris dan Kanada yang saat ini bekerja di Australia sebagai Penasihat Senior untuk Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), sebuah organisasi yang bermarkas di Amerika. Ia adalah seorang pakar di bidang **perdagangan dan pangan** serta telah menulis banyak terbitan terkait keamanan pangan, peraturan perdagangan multilateral dan struktur pasar pertanian global. Ia memiliki gelar master untuk kebijakan sosial, perencanaan dan partisipasi di negara berkembang.

Oduor Ong'wen

Kenya, Direktur SEATINI (Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute), adalah mantan direktur eksekutif EcoNews Africa. Ia memiliki gelar master untuk kebijakan ekonomi di negara berkembang dan gelar sarjana untuk matematika dan kimia serta merupakan pakar untuk isu **perdagangan dunia** dan **keberlanjutan**.



Anna Luiza Ferreira Pijnappel

Brazil, konsultan untuk Departemen Urusan Luar Negeri pada Kementerian Pembangunan Perdesaan Brazil (MDA). Dalam perannya ini, ia mengikuti secara dekat **negosiasi perdagangan pertanian** di WTO dan MERCOSUR. Ia memiliki perhatian khusus untuk pengaruh **perjanjian perdagangan** terhadap pertanian keluarga di Brazil. Pijnappel memiliki gelar master untuk hubungan internasional.



Rita Schwentesi Rindermann,

Berasal dari Jerman dan sudah 20 tahun menetap Mexico, ia adalah koordinator riset CIESTAAM (Pusat Penelitian Pertanian Internasional untuk aspek Ekonomi, Sosial dan Teknologi Universitas Chapingo). Spesialisasi Rindermann adalah **bab pertanian pada Perjanjian Bebas Amerika Utara** (NAFTA). Ia memiliki gelar master untuk budidaya tanaman dan Ph.D untuk ilmu ekonomi pertanian internasional.



Daniel De La Torre Ugarte

Peru, namun sudah menetap di Amerika selama 15 tahun, ia adalah direktur rekanan di Pusat Analisa Kebijakan Pertanian Universitas Tennessee. Lingkup penelitian utamanya adalah **manajemen persediaan pertanian**. Ugarte telah memproduksi banyak publikasi termasuk didalamnya adalah laporan “Rethinking **US Agricultural Policy: Changing Course to Secure Farmer Livelihoods Worldwide**” (2003). Ia memiliki gelar Ph.D untuk ilmu ekonomi pertanian.



Wolfgang Sachs (Moderator)

Jerman, adalah rekanan senior di Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. Lingkup penelitian utamanya adalah **globalisasi** dan **keberlanjutan, lingkungan** dan **pembangunan** serta **bentuk-bentuk baru kesejahteraan**. Sachs merupakan kordinator dan penulis utama “The Jo'burg Memo. Fairness in the Fragile World” (2002) Dia memiliki gelar Master untuk sosiologi dan teologia serta Ph.D untuk ilmu sosial.



Tilman Santarius (Co-Moderator)

Jerman, rekanan peneliti senior di Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy. Lingkup kerjanya yang terutama adalah instrumen ekonomi untuk **kebijakan iklim**, pemerintahan global dan isu terkait **perdagangan dan lingkungan**. Bersama Wolfgang Sachs ia turut menulis buku “Fair Future. Limited Resources, Security, and Global Justice” (2007). Ia memiliki gelar Master untuk Sosiologi, antropologi dan ekonomi.



Organisasi

Heinrich Böll Foundation (HBF) merupakan bagian dari gerakan politik hijau yang berkembang diseluruh dunia, yang muncul sebagai reaksi terhadap politik tradisional sosialisme, liberalisme dan konservatisme. Doktrin utamanya adalah ekologi dan keberlanjutan, demokrasi dan hak asasi manusia, penentuan diri sendiri dan keadilan. HBF secara khusus memberikan penekanan untuk demokrasi jender dan ini berarti emansipasi sosial dan hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Organisasi ini juga berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi kebudayaan dan etnis minoritas serta untuk partisipasi sosial dan politik para imigran. HBF juga turut memajukan kebijakan-kebijakan yang anti-kekerasan dan mendukung perdamaian yang proaktif.

Untuk mencapai tujuannya, HBF mencari kemitraan dengan organisasi lain yang memiliki kesepahaman nilai. HBF merupakan organisasi independen yang memiliki kekuasaan untuk menentukan sendiri prioritas dan kebijakannya. Meski berlokasi di Jerman namun HBF adalah aktor internasional baik dalam konteks konsep dan praktek.

Nama organisasi ini berasal dari nama seorang penulis dan pemenang Nobel, Heinrich Böll dan ini mencirikan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi ini yaitu: mempertahankan kebebasan, mendorong kekuatan masyarakat sipil, toleransi, keterbukaan serta penghargaan terhadap seni dan budaya sebagai ruang berpikir dan aksi.

MISEREOR didirikan pada tahun 1958 sebagai sebuah lembaga yang berperan untuk melawan kelaparan dan penyakit di dunia. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga pembangunan luar negeri Gereja Katolik Jerman, Misereor menawarkan kerjasama dalam semangat kemitraan dengan semua pihak yang memiliki keinginan baik untuk memajukan pembangunan, melawan kemiskinan di seluruh dunia, melepaskan manusia dari ketidakadilan, mendorong solidaritas dengan kaum miskin dan yang dipinggirkan lainnya, serta mendorong terciptanya satu dunia yang tenteram. Misereor dimandatkan oleh Gereja Katolik Jerman untuk menghilangkan sumber kesulitan dan penderitaan yang muncul dalam bentuk kelaparan, penyakit, kemiskinan dan wajah lain penderitaan manusia yang terjadi di Asia, Afrika dan Amerika Latin, sehingga memungkinkan orang-orang yang dipengaruhi untuk dapat hidup bermartabat, dan juga untuk memajukan keadilan, kebebasan, rekonsiliasi dan perdamaian dunia. Asistensi yang disediakan untuk negara-negara Selatan adalah untuk mendorong dan mendukung kemampuan untuk menolong diri sendiri dan membuka jalan untuk perbaikan kondisi kehidupan kaum miskin secara terus menerus. MISEREOR juga terlibat dalam pendidikan, kerja-kerja advokasi dan kampanye di Selatan.

Wuppertal Institute menggali dan menemukembangkan bentuk, strategi dan instrumen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional dan internasional. Penelitian keberlanjutan di Wuppertal Institute berfokus pada ekologi dan kaitannya terhadap ekonomi dan masyarakat. Penekanan khusus diberikan untuk analisa dan dukungan inovasi teknologi dan sosial yang mampu memisahkan kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi dengan penggunaan sumber daya alam. Inilah gambaran aktivitas organisasi yang dituliskan dalam pernyataan misi Wuppertal Institut. Berdasarkan disiplin klasik keilmuan, penelitian yang dilakukan mengkombinasikan berbagai pendekatan yang mampu menghasilkan penyelesaian praktis dan yang mampu dilaksanakan oleh pengguna. Permasalahan, penyelesaian dan jejaring mendapatkan perhatian yang sama di tingkat global, nasional dan regional/lokal.

Institut ini didirikan tahun 1991 dibawah pengarahannya Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Professor Peter Hennicke memimpin sebagai presiden dan kepala pimpinan penelitian. Manager bisnis adalah Brigitte Mutert-Breidbach. Institut ini berada di Wuppertal dan memiliki kantor di Berlin semenjak 2004. Pada 2005, Wuppertal Institute dan United Nations Environment Programme bersama-sama mendirikan UNEP/Wuppertal Institute Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) yang juga berbasis di Wuppertal.

HEINRICH BÖLL STIFTUNG

Yayasan Politik Hijau



Organisasi
Keuskupan Jerman
untuk Kerjasama
Pembangunan



Institut untuk
Penelitian Terapan
Berkelanjutan

Perombakan peraturan perdagangan pertanian merupakan pusat dari negosiasi membangun kerangka kerja multilateral ekonomi global yang berlangsung didalam organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization – WTO). Namun, perombakan yang ditawarkan tidak mampu melindungi masa depan pertanian di seluruh dunia. Sebaliknya, peraturan-peraturan tersebut akan memperburuk keputusan yang tengah dialami para petani dan melemahkan ekosistem lokal dan global. Laporan ini berusaha menggali arahan-arahan baru peraturan perdagangan yang melampaui paradigma perdagangan bebas. Dengan memberikan perhatian pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pertanian dan komunitas pedesaan, laporan ini menawarkan perpektif politik dan perangkat kebijakan bagi sebuah sistem perdagangan yang memberikan peluang bagi kaum miskin, mempertahankan lingkungan dan membantu pertanian menuju era paska fosil.

Laporan ini merupakan hasil dari Dialog Ecofair Trade, konsultasi yang telah dilakukan selama dua tahun, yang telah melalui proses yang berlangsung diberbagai benua. Usulan-usulan yang ada didalamnya telah didiskusikan dan diperbaiki oleh sejumlah besar perwakilan dari organisasi tani dan inisiatif akar rumput lain, politikus, kaum akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Kondisi saat ini merupakan waktu puncak untuk mencapai perubahan cara pandang dan memulai negosiasi perdagangan menuju perjanjian perdagangan yang berkelanjutan, laporan ini diposisikan sebagai kontribusi terhadap tujuan tersebut.

www.ecofair-trade.org